

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dalam suatu negara merupakan hal penting yang harus dijadikan prioritas dalam kehidupan pengelolaan negara. Khususnya Indonesia yang merupakan negara dengan prinsip kuat menjunjung kesejahteraan segenap rakyatnya. Hal ini berdasarkan pada cita-cita nasional yang tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia itu sendiri, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Alinea ke empat yang berbunyi “Mensejahterakan kehidupan umum”. Pembangunan dalam sektor ekonomi diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengembangkan sektor-sektor yang berkaitan dengan kualitas hidup rakyat dalam negara tersebut. Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan lembaga-lembaga nasional termasuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran, penurunan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut.<sup>1</sup> Selain itu peran serta pemerintah dalam meningkatkan peran serta lembaga dan/atau individu sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lira Zohara, *Foreign Direct Investment Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam*, (Semarang: HES UIN Walisongo, 2021), 61

<sup>2</sup> PP Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pasal 15 b.

Melihat konsepsi dasar tersebut, segala hal yang berkaitan dengan tujuan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia harus diupayakan. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, yang mana konsepsi-konsepsi guna menuju kesejahteraan tersebut hendaknya berpatokan pada koridor-koridor syariah. Pengupayaan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Q.S Al-Qasas: 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>3</sup>

Menurut Abdullah bin Muhammad, penafsiran ayat tersebut adalah penggunaan segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik berupa kekayaan yang melimpah maupun kesenangan yang berpanjang dalam melaksanakan ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepada-Nya melalui berbagai amal yang dapat menghasilkan pahala di dunia dan akhirat.<sup>4</sup> Berdasarkan tafsir tersebut orientasi dari ayat ini merujuk pada kesejahteraan atau falah dalam konteks dunia dan akhirat. Apabila dihubungkan dalam kontekstual penelitian ini, maka kesejahteraan tersebut

<sup>3</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Kemenag RI, 2019)., 567

<sup>4</sup> Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahmān bin Ishāq Alu Syaikh. *Lubab al-Tafsīr Min Ibn al-Kašīr*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., (Jakarta: Pustaka Imam al-Syafi'I, 2013), jil 7, 127.

dilakukan dan diseleenggarakan oleh pemangku kekuasaan atau *amirul mu'minin* demi kesejahteraan umat.

Menurut M. Quraish Shihab, penafsiran ayat tersebut adalah bahwa seseorang diperbolehkan memanfaatkan kekayaannya untuk merasakan kenikmatan dunia, dengan syarat bahwa hak Allah terkait harta tersebut telah terpenuhi dan penggunaannya tidak melanggar ketentuan Allah.<sup>5</sup> Melanggar ketentuan ini dimaksudkan dalam konteks penyelenggaraan yang *dzolim* dan tidak bertujuan pada kesejahteraan umum sesuai pedoman cita-cita nasional dalam UUD RI 1945.

*Hal ini secara jelas bahwa pemegang kekuasaan dalam kehidupan bernegara hendaklah berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dengan cara yang benar dan sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hal ini berhubungan langsung dengan kondisi yang sedang dialami oleh masyarakat secara luas, sehingga berbagai kondisi harus secara cermat ditangkap oleh pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara dengan orientasi kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang menjadi acuan dalam menilai kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Salah satu yang menjadi acuan atau indikator dalam menilai kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi atau tingkat pembangunan manusianya. Mulai dari umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak.*

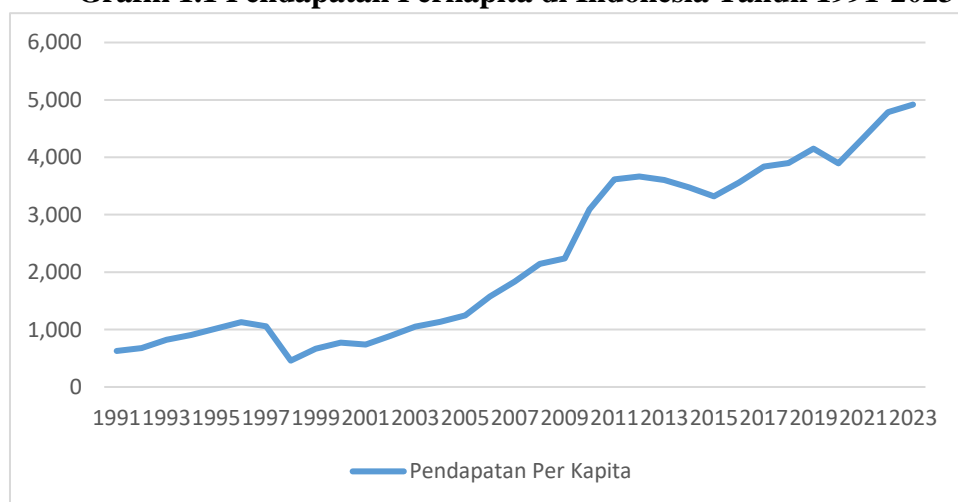
*Pembahasan dalam konteks secara merinci, pembangunan manusia sendiri dapat dilihat dari mengukur tingkat pendapatan perkapita.*

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), vol. 9, 665.

*Pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kelayakan hidup masyarakat. Kelayakan di sini diartikan dengan daya beli, sirkulasi perekonomian, dan kemampuan penduduk untuk menaikkan taraf perekonomiannya. Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara atau daerah pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. pendapatan perkapita dihitung berdasarkan pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai ukuran kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu negara maupun daerah.<sup>6</sup> Pergerakan perubahan tingkat pendapatan perkapita mulai dari tahun 1991 hingga 2023 dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut:*

**Grafik 1.1 Pendapatan Perkapita di Indonesia Tahun 1991-2023**



*Sumber : UNDP Human Development Report Data Set*

Melihat dari data tersebut bahwa kecenderungan pada naiknya pendapatan perkapita di Indonesia dari tahun ke tahun. Dimulai pada tahun 1991 pada angka 4.448 yang diartikan bahwa pendapatan perkapita di

<sup>6</sup> Sukirno Sadono, "Makro Ekonomi: Edisi Ketiga" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)., 423

Indonesia pada tahun tersebut masuk dalam kategori rendah. Puncaknya pada tahun 2023 pada angka 4919 USD yang masuk pada kategori pendapatan perkapita menengah ke atas. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2009-2010 dengan peningkatan 855 USD PPK Dolar Amerika. Namun yang menjadi sorotan bahwa pada tahun 1997-1998 yang bertepatan dengan terjadinya krisis moneter. Penurunan ini mencapai 595 USD PPK Dolar Amerika. Hal ini tentu menjadi perhatian dimana pada beberapa tolak ukur pendapatan perkapita terdapat komponen-komponen yang berhubungan dan bergantung dengan kondisi perekonomian pada saat itu juga.

Penelitian ini fokus pembahasan mengenai keterkaitan dampak variabel bebas yakni utang luar negeri atau ULN dan penanaman modal asing atau PMA akan lebih dikerucutkan untuk pembahasan terhadap pendapatan perkapita. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak ULN dan PMA di Indonesia dalam sektor pertumbuhan ekonomi. Menilik dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pengaruh ULN dan PMA terhadap pendapatan perkapita di Indonesia yang berkesimpulan bahwa ULN memiliki pengaruh bahkan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan perkapita rakyat Indonesia. Tentu hal ini menjadi penting sebagai dasar untuk menelaah lebih dalam mengenai dampak-dampak keberadaan ULN terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal pendapatan perkapita.

Namun lain halnya dengan pengaruh ULN, pengaruh PMA dikatakan dalam penelitian tersebut tidak memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah pendapatan perkapita di Indonesia. Di sana dikatakan terdapat pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan PMA tidak memiliki pengaruh langsung. Salah satu penyebabnya ialah adanya pelarian modal atau repatriasi modal. Untuk mendasari pendapat tersebut, berikut ini adalah hasil penelitian yang menyatakan hal-hal di atas:<sup>7</sup>

**Tabel 1. 1 Tabel Hasil Uji Pengaruh ULN dan PMA Terhadap Pendapatan Perkapita Di Indonesia**

Uji \ Aspek	ULN terhadap Pendapatan Perkapita	PMA terhadap Pendapatan Perkapita
Uji Model	Uji gabungan kedua variabel berpengaruh sebesar 56,4% dan 43,6% sisanya merupakan pengaruh dari faktor lain diluar dua variabel bebas tersebut	
F Hitung	3,189355	1,350381
F Tabel	1,714	1,714
Probabilitas	0,0041	0,1900

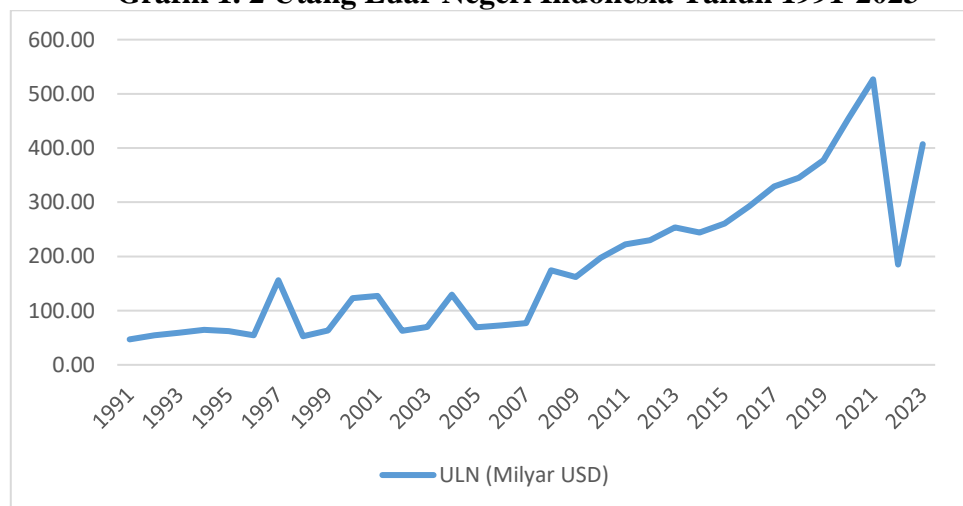
Pada kondisi perekonomian suatu negara pada sektor pendapatan, utang luar negeri dan penanaman modal asing menjadi komponen penting dan krusial apabila terjadi defisit perekonomian dalam suatu negara. Alih-alih melakukan pencetakan uang baru yang selanjutnya digunakan sebagai stimulus pembangunan dalam suatu negara, dua komponen ini menjadi

<sup>7</sup> Ahmad Faiz Zainal, "Analisa Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Perkapita" (Malang: Universita Brawijaya, 2007).

pilihan terbaik. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindari terjadinya inflasi pada nilai mata uang. Akibat dari inflasi secara umum merupakan menurunnya daya beli masyarakat karena secara nyata menyebabkan penurunan pendapatan.<sup>8</sup>

Perencanaan pengembangan dalam peningkatan pembangunan manusia melalui pembiayaan dari utang luar negeri dan investasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan layaknya pada grafik 1.2 di bawah ini.

**Grafik 1. 2 Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1991-2023**



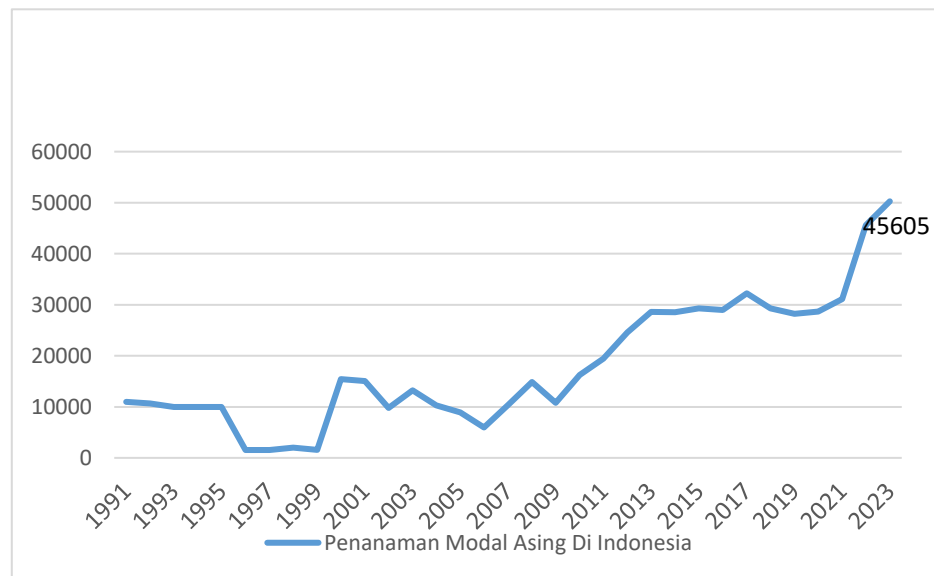
*Sumber: Buku Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Bank Indonesia*

Dalam grafik tersebut terjadi tren naik dan mengalami peningkatan utang secara signifikan pada tahun 2022-2023 dengan angka 222,2 Milyar USD, yang mana pada saat itu terjadi pandemi Covid-19 yang memaksa penerbitan utang luar negeri guna rencana stabilisasi kondisi perekonomian dan kesehatan di Indonesia.

<sup>8</sup> Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2000), 181.

Mengenai penanaman modal asing yang masuk dalam pembukuan keuangan Indonesia yang diperoleh dari berbagai sumber penanaman modal oleh asing baik bilateral, multilateral, maupun swasta bisa dilihat dalam grafik 1.3 dibawah ini.

**Grafik 1.3 Penanaman Modal Asing Di Indonesia Tahun 1991-2023**



*Sumber: Perkembangan Realisasi Investasi PMA Negara Indonesia tahun 199-2023 oleh NSWI-BKPM (diolah)*

Melihat grafik di atas bisa dilihat bahwa secara garis besar dalam kondisi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami fluktuasi yang signifikan dengan tren turun pada 1991 hingga puncaknya pada 1996-1997 yang disinyalir akibat adanya krisis moneter pada dasawarsa akhir abad 20 dengan titik terendah di tahun 1996/1997 sebesar 1.540,1 juta Dollar AS. Sedangkan pada tahun 2000 hingga tahun 2010 terjadi fluktuasi naik turun yang diawali kenaikan tajam setelah memasuki awal abad 21 yang mana hal ini merupakan tanda bahwa pemulihan stabilitas perekonomian setelah krisis moneter sedang terjadi. Kenaikan yang sangat tajam terjadi pada



tahun 1999 menuju tahun 2000. Selanjutnya dinamis menurun hingga tahun 2008 akibat krisis moneter tahun tersebut. Kenaikan tajam atau tren naik terjadi pada 2009 hingga 2013 dan cenderung stabil hingga 2023. Puncak capaian PMA Indonesia berada di tahun 2023 dengan total PMA sebesar 50267,5 juta Dollar AS.

Melihat data yang telah tercantum di atas, terdapat kisi-kisi yang menjadi pertanyaan peneliti. Apakah angka-angka sedemikian rupa tersebut telah dihasilkan dari kegiatan yang sejalan atau bahkan bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam yang lebih spesifik pada maqashid syariah. Hal ini tentu menjadi bahasan yang bisa dielaborasi pada pengadaan utang luar negeri dan penanaman modal asing di Indonesia sehingga dapat dicari apakah terdapat dampak terhadap kondisi yang tergambarkan pada laporan pendapatan perkapita di Indonesia yang telah tercantum di atas. Hal ini membuat peneliti tertarik dikarenakan terjadi fluktuasi yang menitik pada rentang tahun tertentu antara 1991 hingga 2023. Imbas pada keberadaan serta kondisi yang menjadi hasil dari kebijakan pemerintah menjadi tolok ukur yang krusial.

Memperjelas dari fenomena berdasar fluktuasi pada tahun tertentu, seperti contoh pada tahun 1998 yang mana terdapat fenomena krisis moneter, terdapat sinyal grafik utang luar negeri yang naik namun penanaman modal asing yang turun dan diikuti oleh pendapatan perkapita yang hampir serupa dengan grafik PMA. Fluktuasi ini disinyalir terdapat hubungan yang erat satu sama lain yang menimbulkan fenomena-fenomena

dan dampak-dampak yang saling berhubungan. Hal ini tentu akan berkaitan dengan persoalan kata utang, permodalan yang menjurus pada kerjasama antar kedua belah pihak yang dalam konteks penelitian ini adalah antara Indonesia dan negara lain secara umum. Hal ini tentu menjadi hal yang perlu ditelaah lebih dalam mengingat aspek penelitian dalam penelitian ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Tingkat pendapatan perkapita sebagai hasil dari adanya kondisi tersebut yang mana menyangkut pada hajat orang banyak atau masyarakat dalam negeri. Apakah ini berhubungan erat dan sejalan dengan prinsip distribusi sesuai tuntunan Islam. Penyelenggaraan pengelolaan dari perekonomian ini apakah sejalan atau malah kontradiktif dengan prinsip-prinsip distribusi kekayaan dalam Islam. Lebih merinci pada penelitian ini, distribusi kekayaan dalam Islam yang diangkat ialah distribusi kekayaan melalui pendapatan perkapita. Pada konteks ini berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada masyarakat yang nantinya akan berpengaruh pada daya beli masyarakat pada waktu tertentu. Hal terkait dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dalam kemampuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan primer (*Dlarûrah*), Sekunder (*Hâjiyah*), Tersier (*Tahsîniyâh*). Lingkup makro ekonomi sendiri terdapat tingkat pendapatan perkapita juga disebabkan oleh distribusi kekayaan yang berhubungan dengan kesenjangan sosial.

Melihat dari penjabaran beberapa kondisi utang luar negeri, penanaman modal asing, dan pendapatan perkapita di Indonesia tersebut

terdapat asumsi saling keterkaitan antar satu sama-lain. Melihat dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan elaborasi mengenai implikasi antar ketiga komponen inti pembahasan dalam penelitian yang akan diangkat dengan judul “Implikasi Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Di Indonesia Terhadap Pendapatan Perkapita Di Indonesia pada Tahun 1991-2023 dalam Perspektif Prinsip Distribusi Kekayaan Islam.”

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi utang luar negeri terhadap terhadap pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 1991-2023 dalam perspektif prinsip distribusi kekayaan Islam?
2. Bagaimana implikasi penanaman modal asing terhadap pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 1991-2023 dalam perspektif prinsip distribusi kekayaan Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan implikasi utang luar negeri indonesia terhadap pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 1991-2023 dalam perspektif prinsip distribusi kekayaan Islam.
2. Untuk menjelaskan Implikasi penanaman modal asing terhadap pendapatan perkapita di Indonesia Pada Tahun 1991-2023 dalam perspektif prinsip distribusi kekayaan Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa berguna baik untuk peneliti sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan kegunaan penelitian ini merupakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara teoritis keilmuan,
  - b. Untuk menjadi bahan kontribusi
2. Kegunaan Praktis
  - a. Secara praktis keilmuan,
  - b. Menambah kekayaan pengetahuan

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Syarifah Nurul Huda, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Makassar (2016) yang berjudul “Pengaruh Utang Luar Negeri Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar Tahun 2009-2013”. Dalam penerapan pembangunan ekonomi dibutuhkan berbagai impuls yang bisa memancing terjadinya kegiatan perekonomian yang efektif. Beberapa contohnya yakni utang luar negeri dan penanaman modal asing. Hal ini berkaitan dengan kondisi grafik dari produk domestik regional bruto. Yang mana hal ini diharapkan bisa menjadi sinyal positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Makassar. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti merupakan variabel atau penyebab dari objek yang diamati masing-masing penelitian yakni utang

luar negeri dan penanaman modal asing. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian oleh peneliti ialah terletak pada objek dan jenis penelitian yang diangkat, penelitian ini mengacu pada objek PDRB Makassar dan dengan metode kuantitatif. Sedangkan peneliti mengangkat objek berupa pendapatan perkapita di Indonesia yang dihubungkan dengan distribusi Islam.

2. Jurnal Lira Zohara, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang (2021) yang berjudul “*Foreign Direct Investment* Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam”. *Foreign Direct Investment* (FDI) atau lebih dikenal dengan Penanaman Modal Asing Langsung memiliki implikasi besar dalam pembiayaan dan proses pembangunan perekonomian dalam suatu negara khususnya Indonesia yang merupakan negara berkembang dengan potensi besar menjadi negara dengan laju perekonomian yang pesat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada variabel atau penyebab dari topik yang diangkat, yakni penanaman modal asing. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti ialah pada objek objek penelitian yang dipengaruhi variabel. Pada penelitian ini objek terpengaruh merupakan pembangunan ekonomi Indonesia, sedangkan peneliti mengangkat objek berupa pendapatan perkapita di Indonesia yang dihubungkan dengan distribusi Islam.

3. Skripsi Ahmad Faiz Zainal, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, Malang (2007) yang berjudul “Analisa Pengaruh Utang Luar Negeri (ULN) Dan Penanaman Modal Asing (PMA) Terhadap Pendapatan Perkapita”. Pendapatan perkapita sangat berkaitan dengan proses yang dilakukan oleh pemerintah berupa kebijakan dan realisasi lapangan. Kebijakan ini juga harus didasari dengan prinsip mensejahterakan rakyat. Kegiatan ini berhubungan erat dengan pendanaan. Dalam penelitian oleh Ahmad Faiz Zainal memiliki kesamaan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini, yakni Utang Luar Negeri (ULN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan variabel *y* berupa Pendapatan Perkapita di Indonesia. Namun yang membedakan penelitian oleh Ahmad Faiz Zainal dengan penelitian ini ialah objek yang menjadi variabel terikat, dalam penelitian Ahmad Faiz Zainal variabel terikatnya ialah pendapatan perkapita saja, sedangkan dalam penelitian ini ialah pendapatan perkapita yang selanjutnya dikaji dalam pandangan *syariat*. Prinsip yang dimaksud ialah distribusi kekayaan dalam pandangan Islam.
4. Jurnal Syofria Meidona, Virell Prastama, dan Elsa Fitri Amran, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat, IAIN Batusangkar (2021) yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Sumatera Barat Tahun 2010-2019)”. Perekonomian dalam suatu negara tidak lepas dari peran tenaga kerja dan SDM yang ada dan menjadi

pemeran utama dalam kegiatan perekonomian tersebut. Hal ini didukung dari adanya peran Investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri, yang selanjutnya akan memiliki kaitan dan kausalitas pada pertumbuhan perekonomian negara terkait yang pada konteks penelitian ini merupakan Indonesia. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang diangkat oleh peneliti ialah variabel atau faktor yang diangkat, yakni investasi. Perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan peletakan PMA sebagai variabel pada penelitian ini. Sedangkan pada penelitian yang diangkat peneliti, PMA diletakkan sebagai objek yang terpengaruh. Selain itu objek utama yang diamati juga berbeda, pada penelitian ini mengamati pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pada penelitian yang diangkat oleh peneliti ialah pendapatan perkapita di Indonesia yang dihubungkan dengan distribusi Islam.

5. Jurnal Indra Darmawan, Pendidikan Ekonomi, FKIP, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta (2022) yang berjudul “Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Perekonomian Indonesia”. Perekonomian memiliki banyak sekali cabang pembahasan dan komponen penyusun perekonomian itu sendiri. Salah satu komponen tersebut merupakan Utang Luar Negeri (ULN). Penerbitan Utang Luar Negeri (ULN) dilakukan guna percepatan laju perekonomian guna mencapai kesejahteraan yang bersifat luas. Selain itu Utang Luar Negeri (ULN) juga menjadi salah satu instrumen pendapatan negara yang lebih layak dibandingkan

pencetakan uang untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang akan berdampak pada inflasi. hal ini bergantung bagaimana efisiensi dan efektivitas dalam pengalokasian utang luar negeri tersebut. Apabila dialokasikan dengan benar, maka ULN akan berdampak positif perekonomian suatu negara, dan sebaliknya apabila terjadi kesalahan dalam pengalokasian akan berdampak kemerosotan perekonomian dalam negara terkait. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti ialah faktor yang mempengaruhi, yakni ULN dan topik yang diangkat dengan inti implikasi atau dampak yang terjadi terhadap objek yang diamati. Perbedaan dari penelitian yang diangkat oleh penelitian ini dan peneliti merupakan objek terpengaruh dalam penelitian yang diangkat, yakni pada penelitian ini merupakan perekonomian Indonesia secara umum. Sedangkan dalam penelitian yang diangkat oleh peneliti ialah pendapatan perkapita di Indonesia yang dihubungkan dengan distribusi Islam.



